

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat dan pertolongan-Nya lah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Blitar Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Good Governance dan Clean Government. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara garis besar menyajikan informasi mengenai gambaran organisasi Bakesbangpol Kota Blitar, serta implementasi dokumen perencanaan dan kinerja seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Perjanjian Kinerja.

Pencapaian kinerja Bakesbangpol Kota Blitar merupakan hasil kerjasama dan kerja keras dari berbagai pihak. Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bakesbangpol Kota Blitar tahun 2024 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Blitar, 5 Pebruari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
Kota Blitar



TOTO ROBANDIYO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 196612041996031004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bakesbangpol Kota Blitar merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang kesatuan bangsa dan politik. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang di dalamnya memuat Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar, Bakesbangpol Kota Blitar mengemban satu misi Pemerintah Kota Blitar, yang pertama misi ke-1 (satu): **“Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan”**.

Dalam rangka mewujudkan Misi tersebut ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) Sasaran Strategis dari Bakesbangpol Kota Blitar yang harus dicapai sesuai target dimana untuk Sasaran Startegis pertama memiliki 2 (dua) indicator kinerja dan Sasaran Strategis ke 2 dan ke 3 masing-masing mempunyai 1 (satu) indikator kinerja. Berikut capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024:

Tujuan : Meningkatnya kehidupan masyarakat yang
kodusif, demokratis serta berwawasan
kebangsaan

Indikator Tujuan : Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Sasaran:

1. Sasaran I

Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat:

- a. Persentase kejadian SARA tertangani terealisasi 100% sama dengan target yang ditetapkan
- b. Persentase konflik sosial tertangani juga terealisasi 100% sama dengan target yang ditetapkan

2. Sasaran Strategis II:

Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam menggunakan hak politik

- a. Persentase Ormas dan Orpol yang aktif teralisasi sebesar 89,53% diatas target yang ditetapkan yaitu 80,3%

3. Sasaran Strategis III:

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah:

Nilai SAKIP Bakesbangpol tahun 2024 ditargetkan 84,98 dapat teralisasi 86,12

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bakesbangpol Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian sasaran/kinerja utama yang dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran oleh seluruh bidang. Pada Tahun 2024 anggaran yang teralokasi untuk Bakesbangpol Kota Blitar sebesar Rp. 28.049.470.361,00 telah terealisasi sebesar Rp. 27.049.731.977,00 atau 96,44%. Program yang dilaksanakan dalam mengelola dana tersebut terdiri dari 6 (enam) program, 12 Kegiatan dan 34 Sub kegiatan.

Berikut tabel capaian kinerja, anggaran dan tingkat efisiensi:

Sasaran	Indikator Sasaran/Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket. Kinerja
Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kejadian SARA tertangani	100	100	100	92,05	1,09	Sangat berhasil
	Persentase konflik sosial tertangani	100	100	100	97,17	1,03	Sangat berhasil
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,3	89,53	111,5	98,09	1,14	Sangat berhasil
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,98	86,12	101,3	93,01	1,09	Sangat berhasil

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian Sasaran/kinerja utama yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Bakesbangpol Kota Blitar tahun 2024 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih dijumpai banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

LAMPIRAN viii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. LATAR BELAKANG 1

 B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 2

 C. MAKSUD DAN TUJUAN 5

 D. DASAR HUKUM 5

 E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS 8

 F. ISU-ISU STRATEGIS 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 10

 A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026 11

 B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

 A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN 18

 1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET
 DAN REALISASI TAHUN 2024 19

 2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
 TAHUN 2021 – 2024 26

 3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR
 PERIODE RENSTRA 28

 4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN
 REALISASI NASIONAL (TARGET SPM) 29

 B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME).. 30

 1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN 31

 2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 32

 3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 33

 C. PRESTASI/ PENGHARGAAN 34

BAB IV. PENUTUP..... 35

 A. KESIMPULAN 35

 B. LANGKAH PERBAIKAN 36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	12
Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan untuk mencapai Sasaran....	12
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	13
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar	16
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2022	19
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022	26
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode RENSTRA	28
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar	29
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Belanja	30
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran untuk setiap Sasaran dan Program Tahun 2022	30
Tabel 3.7 Alokasi Per Sasaran Pembangunan	31
Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Per Sasaran	32
Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
Tabel 4.1 Rencana Tindak Lanjut LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2023	36

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- A. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
- C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- D. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
- E. Daftar Ormas dan Orpol Kota Blitar Tahun 2024

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sesuai pasal 5 huruf e Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan salah satu unsur penyelenggaraan SAKIP.

Untuk selanjutnya petunjuk teknis Pelaporan Kinerja diatur secara detail dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diamanatkan bahwa Kepala OPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang diliputi semangat akuntabilitas, Bakesbangpol Kota Blitar secara periodik setiap tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kinerja Utama Bakesbangpol Kota Blitar yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja kepada pemberi mandat, dalam hal ini adalah pertanggungjawaban kepada Walikota Blitar. Di dalam laporan kinerja ini disampaikan hasil capaian Bakesbangpol Kota Blitar

secara terukur, sehingga LKjIP ini diproyeksikan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya misi ke-1 Pemerintah Kota Blitar yang diemban oleh Bakesbangpol Kota Blitar, yaitu: **Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan**. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP ini dapat berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Bakesbangpol Kota Blitar.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar. Kedudukan Bakesbangpol merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang kesatuan bangsa dan politik dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bakesbangpol mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pelaksanaan evaluasi politik;
- d. penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasar peraturan perundang-undangan; dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan;

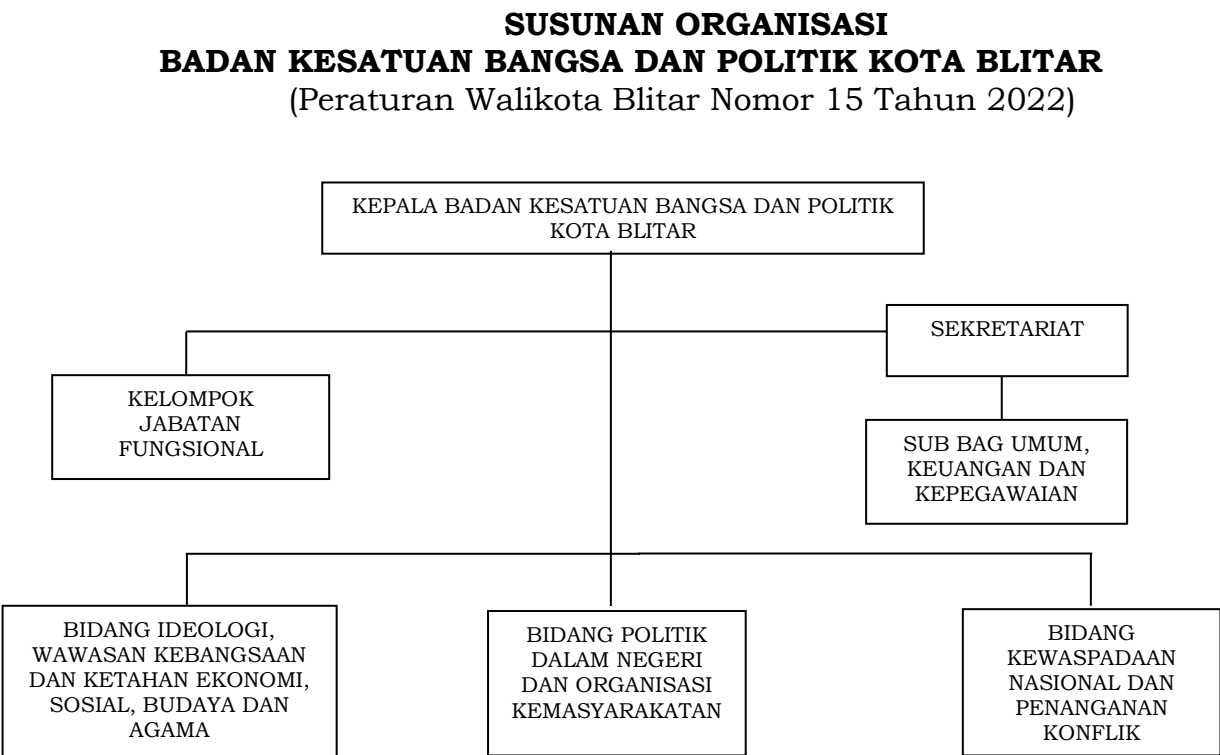
- f. Pengkoordinasian kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasar peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
- i. pelaksanaan pendataan, penyusunan kebijakan dan pembinaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
- j. pelaksanaan pendataan, analisa, pembuatan kajian, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- l. pelaksanaan analisa guna peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan faslitasi penanganan konflik sosial;
- m. pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- n. penyusunan kebijakan penanganan SARA dan konflik sosial di Kota Blitar;
- o. perumusan kebijakan peningkatan keaktifan organisasi masyarakat dan organisasi politik di Kota Blitar;
- p. penyusunan kebijakan indeks kapasitas daerah;
- q. penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup badan kesatuan bangsa dan politik;
- r. perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
- s. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik;

- t. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan kesatuan bangsa dan politik secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- u. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas Badan;
- v. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya susunan organisasi Bakesbangpol terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Bakesbangpol Kota Blitar adalah sebagai berikut:



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media pertanggungjawaban yang akuntabel mengenai pengukuran capaian kinerja organisasi. LKjIP ini diharapkan dapat menjadi:

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja;
2. Sarana penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
3. Daya dorong (Supporting Unit) bagi OPD lain untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan daerah dengan baik dan benar (good governance) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mendorong tumbuhnya OPD yang akuntabel yang beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
5. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Tujuan pelaporan kinerja:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun

- 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
 30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.

E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS

Aspek-aspek Strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian sasaran/IKU Bakesbangpol Kota Blitar diantaranya:

1. Kondusifitas Kerukunan Umat Beragama
2. Peran aktif Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam deteksi dini potensi konflik
3. Adanya akses yang baik untuk infra struktur dan supra struktur Politik
4. Adanya koordinasi yang baik di jajaran Bakesbangpol Kota Blitar dengan Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait
5. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang kompeten

6. Adanya bentuk jejaring sebagai wadah/koordinasi lintas sectoral
7. Partisipasi Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan Demokrasi

F. ISU-ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin di hadapi ke depan oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Bakesbangpol Kota Blitar dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi, situasi, keadaan peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Isu-isu strategis tersebut antara lain:

1. Konflik sosial belum mendapatkan solusi penanganan secara optimal, belum tuntas, menumbuhkan konflik baru, hingga tidak jarang terkesan pembiaran dan berlarut-larut;
2. Tidak adanya kewajiban ormas mendaftarkan keberadaannya kepada Bakesbangpol;
3. Belum adanya pembinaan Kampung Pancasila setelah dibentuk.

Dengan mengetahui isu-isu strategis yang dihadapi, diharapkan dapat menganalisis lingkungan internal yang perlu mendapat fokus lebih untuk ditingkatkan, strategi yang relevan untuk meningkatkan, serta pengembangan organisasi yang mengarah pada pencapaian tujuan.

BAB 11

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan adalah suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Perlunya suatu perencanaan yang strategis untuk mencapai tujuan dimana rencana strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana Strategis merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam Rencana Strategis ini termuat tujuan, sasaran dan program yang mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran RPJMD Kota Blitar.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kinerja tujuan, sasaran, dan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Bakesbangpol Kota Blitar 2021-2026 telah mempertimbangkan baik tentang kondisi dan potensi serta prospek perkembangan sebagai kekuatan untuk menentukan kunci keberhasilan maupun yang menyangkut hambatan, kendala, dan resiko yang dihadapi sebagai kelemahan dan tantangan yang harus ditanggulangi. Berdasarkan Visi pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar periode (2021-2026) adalah: **“KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya –upaya yang akan dilaksanakan, dimana Bakesbangpol Kota Blitar berada pada misi kesatu, yaitu: **“Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan”**.

Mengacu dari misi inilah disusun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Bakesbangpol Kota Blitar yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

NO	Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran
	Uraian	Indikator		
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kejadian SARA tertangani
				Persentase konflik sosial tertangani
			Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif
2.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran diperlukan strategi dan kebijakan yang harus dilakukan:

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran

MISI I : Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Mengoptimalkan penanganan apabila ada kejadian SARA	Koodinasi aktif dengan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB), dan intansi terkait
		Mengoptimalkan penanganan apabila ada konflik sosial	1. Sinergi, harmonisasi pengampu kebijakan / Stake holder dalam penanganan konflik; 2. Optimalisasi peran Timdu Penanganan Konflik Sosial 3. Sosialisasi, edukasi tentang pentingnya kewaspadaan dini; 4. Optimalisasi peran media massa
	Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam menggunakan hak politik	Meningkatkan peran orpol dalam Pendidikan politik dan memantau keaktifan ormas	Meningkatkan koordinasi dan pemantauan kepada ormas dan orpol
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah berbasis kinerja 2. Membudayakan monev kinerja secara berjenjang

Sedangkan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode RENSTRA adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
		1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		3	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
		1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi

			Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		3	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
		1	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
		2	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Meningkatnya Tata Kelola	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Perangkat Daerah		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		1	Pengadaan Mebel
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		2	Pemeliharaan Mebel
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Walikota Blitar sebagaimana terlampir. Perjanjian kinerja didasarkan pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BLITAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kejadian SARA tertangani	100 %
		Persentase konflik sosial tertangani	100 %
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,3%
3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	A (84,98)

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut di dilaksanakan 6 (enam) program dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 28.049.470.361,00

BAB 111 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik kepada pihak yang memberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas. Untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel perlu dilakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang telah dicapai dengan kinerja yang seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara periodik per tribulan dan per tahun. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Pada capaian kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian strategis untuk kemudian dapat disusun tindak lanjut yang harus dipenuhi untuk melakukan perbaikan ataupun peningkatan. Untuk perbaikan dan peningkatan kinerja berbasis hasil evaluasi dapat dirumuskan solusi yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan/ sasaran serta pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase tingkat capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$

2. Rumus 2:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase tingkat capaian = $\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standart penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil

3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja berisi capaian/sasaran/kinerja utama/program/kegiatan, indikator kinerja dan pencapaian target masing-masing indikator. Pengukuran kinerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kejadian SARA tertangani	100%	100%	100%	Sangat berhasil
	Persentase konflik sosial tertangani	100%	100%	100%	Sangat berhasil
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,3%	89,53%	111,5%	Sangat berhasil
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,98	86,12	101,3%	Sangat berhasil

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024

Sesuai Rencana Strategis Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2021- 2026, terdapat 3 (tiga) sasaran. Untuk Sasaran Strategis pertama memiliki 2 (dua) indicator kinerja, sedangkan Sasaran Strategis ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) masing-masing memiliki 1 (satu) indicator kinerja. Berikut adalah analisis capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi Tahun 2024:

I. Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat.

I.1 Indikator kinerja yang pertama ini adalah Persentase kejadian SARA tertangani, capaian indikator kinerja utama dapat diukur dengan formulasi:

$$\begin{aligned}\text{Formulasi} &= \frac{\text{Jumlah kejadian SARA tertangani}}{\text{Jumlah kejadian SARA}} \times 100 \% \\ &= \frac{0}{0} \times 100 \% \\ &= 100 \%\end{aligned}$$

Selama tahun 2024 tidak ada kejadian SARA sehingga realisasi yang dicapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 %, sehingga capaian kinerjanya 100 % dengan kategori **sangat berhasil**.

Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganan kejadian SARA:

- a. Peran aktif FKUB dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama
- b. Peran tokoh-tokoh agama yang selalu memberikan pengertian-pengertian terkait toleransi dan moderasi beragama
- c. Ekistensi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Kota Blitar dan FPK Tingkat Kecamatan se-Kota Blitar sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat dari berbagai latar belakang SARA dalam kerangka NKRI
- d. Eksistensi Forum Dialog antar Pemuka Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan sehingga tercipta sikap saling menghormati dan menghargai antar Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan supaya tumbuh iklim yang kondusif di Kota Blitar

Faktor penghambat penanganan kejadian SARA:

- a. Kurangnya pemahaman nilai-nilai toleransi beragama
- b. Penerimaan yang salah terkait dengan isu-isu toleransi
- c. Kesenjangan sosial mengenai tingkat kesejahteraan antar kelompok SARA
- d. Ketidaksiapan masyarakat menerima perubahan teknologi sosial mendorong renggangnya interaksi sosial antar anggota kelompok masyarakat

Rencana tindak lanjut:

- a. Perlu melakukan sosialisasi yang berkelanjutan yang tujuannya mampu mewujudkan sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama
- b. Peran stakeholder dalam memasyarakatkan moderasi beragama
- c. Mengoptimalkan peran FPK Tingkat Kota Blitar dan FPK Tingkat Kecamatan sebagai wadah komunikasi antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan
- d. Meningkatkan interaksi antar Pemuka Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan guna menumbuhkan sikap inklusif (terbuka) antar Pemuka Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan yang diharapkan akan diikuti oleh masing-masing anggota komunitas

I.2 Indikator kinerja kedua adalah persentase konflik sosial tertangani, capaian indikator kinerja utama dapat diukur dengan:

$$\begin{aligned}\text{Formulasi} &= \frac{\text{Jumlah konflik sosial tertangani}}{\text{Jumlah konflik sosial}} \times 100 \% \\ &= \frac{0}{0} \times 100 \% \\ &= 100 \%\end{aligned}$$

Selama tahun 2024 tidak ada kejadian konflik social sehingga diperoleh hasil perhitungan, realisasi sebesar 100 %, dengan target yang ditetapkan adalah sebesar 100 %. Realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga didapat capaian kinerja utama yang kedua sebesar 100 %, dengan kategori **sangat berhasil**.

Faktor pendorong keberhasilan penangan konflik sosial:

- a. Melakukan mediasi/rembug kepada masyarakat dalam menangani Konflik social/masyarakat yang terjadi/muncul dan bekerjasama dengan instansi terkait
- b. Patroli gabungan yang dilakukan secara rutin dan berkala untuk mendeteksi penyakit masyarakat (pekat)
- c. Semakin bersinergi dan harmonisnya hubungan antar lembaga (Forkopimda dengan FKDM, Tim Kewaspadaan Dini, dan instansi/instusi terkait lainnya)

Faktor Penghambat penanganan konflik social:

- a. Konflik sosial belum mendapatkan solusi penanganan secara optimal, belum tuntas, menumbuhkan konflik baru, hingga tidak jarang terkesan pembiaran dan berlarut-larut.
- b. Kurang optimalnya upaya deteksi dini potensi konflik
- c. Kurangnya optimalnya peran FKDM dan Tim kewaspadaan Dini dalam mengembangkan upaya deteksi dini potensi konflik dan mengoordinasikannya dengan institusi/instansi terkait

Rencana tindak lanjut:

- a. Secara intens menggali informasi dari masyarakat

- b. Sinergi, harmonisasi pengampu kebijakan / *Stake holder* dalam penanganan konflik;
- c. Optimalisasi peran Timdu Penanganan Konflik Sosial
- d. Sosialisasi, edukasi tentang pentingnya kewaspadaan dini;
- e. Optimalisasi peran media massa
- f. Penguatan kewaspadaan dini Masyarakat
- g. Penguatan peran FKDM tingkat kecamatan/kota dan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan/Kota

II. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik.

Indikator kinerja dari sasaran kedua adalah persentase ormas dan orpol yang aktif, capaian indikator kinerja utama dapat diukur dengan:

$$\begin{aligned}
 \text{Formulasi} &= \frac{\text{Jumlah ormas dan Orpol yang aktif}}{\text{Jumlah ormas dan Orpol terdaftar}} \times 100\% \\
 &= \frac{154}{172} \times 100\% \\
 &= 89,53\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan, diperoleh realisasi kinerja sebesar 89,53 %, dengan target yang ditetapkan adalah sebesar 80,3 %. Tingginya realisasi dibanding target yang telah ditetapkan menyebabkan capaian kinerja utama mencapai 111,5% dengan kategori **sangat berhasil**.

Pada tahun 2024 tercatat jumlah ormas dan orpol terdaftar ada 172 terdiri dari 155 ormas dan 17 Orpol. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Bakesbangpol Kota Blitar diketahui ormas yang aktif sebanyak 137 dan untuk Orpol yang aktif di Kota Blitar sebanyak 17. Jumlah total Ormas dan Orpol aktif 154 (terlampir).

Faktor Pendorong:

- a. Pemantauan/cross chek dilapangan secara rutin dan berkala yang dilakukan oleh bidang Poldagri terkait keberadaan, kegiatan dan keaktifan Ormas dan Orpol
- b. Adanya kegiatan Bakesbangpol yang melibatkan Ormas dan Orpol.
- c. Data yang ter update
- d. Koordinasi melalui grup WA maupun secara tatap muka

Faktor penghambat:

- a. Belum adanya kewajiban ormas dan orpol mencatatkan diri ke Bakesbangpol
- b. Ormas dan Orpol tidak melaporkan kegiatannya kepada Bakesbangpol
- c. Masih banyak ormas yang enggan untuk melaporkan keaktifannya/keberadaannya
- d. Ormas yang sudah ada tetapi tidak aktif tidak bisa dihapus atau dihilangkan
- e. Belum terbentuknya Tim terpadu pengawasan ormas
- f. Orpol yang tidak memiliki keterwakilan di DPRD menjadi Orpol yang mati suri
- g. Tidak adanya dana bantuan untuk ormas sehingga ormas enggan melaporkan kegiatannya

Rencana tindak lanjut:

- a. Sosialisasi penggunaan aplikasi e-landa untuk Ormas dan Orpol guna secara rutin dan berkala melaporkan kegiatannya dan perubahan yang terjadi dalam struktur organisanya termasuk perpindahan kantor sekretariat/keberadaannya.
- b. Dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas
- c. Diadakan kegiatan yang melibatkan Orpol yang ada di Kota Blitar

III. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari sasaran ke dua ini adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Tahun 2024 nilai SAKIP

Bakesbangpol mengalami kenaikan menjadi 85,62 dari nilai 85,54, pada tahun 2023.

Faktor Pendorong:

Usaha keras untuk melengkapi dan merevisi dokumen SAKIP sesuai permintaan tim penilai SAKIP.

Faktor Penghambat indikator kinerja ini adalah:

- a. Kurang maksimalnya tim SAKIP yang sudah dibentuk dalam pengerjaan dokumen-dokumen.
- b. Kurangnya monitoring pencapaian kinerja
- c. Minimnya Inovasi
- d. Belum maksimalnya upaya nyata dalam meningkatkan capaian kinerja
- e. Kurangnya sosialisasi hasil pengukuran kinerja agar untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh seluruh unit/satuan kerja
- f. Belum maksimalnya pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi.

Rencana tindak lanjut:

- a. Melaksanakan review perencanaan dengan monev berjenjang
- b. Pembagian tugas dan tanggung jawab kepada seluruh tim SAKIP dalam penyusunan dokumen
- c. Menyusun Tindak Lanjut rekomendasi monitoring pencapaian kinerja jangka menengah.
- d. Menyusun Laporan Hasil monitoring Tindak Lanjut rekomendasi monitoring pencapaian kinerja jangka menengah TW 3.
- e. Menyusun Ranwal Renstra yang memuat inovasi yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama 5 (lima) tahun
- f. Menyusun Rancangan LKjIP 2024 yang menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

- g. Mengoptimalkan sosialisasi hasil pengukuran kinerja agar untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh seluruh unit/satuan kerja.
- h. Mengoptimalkan sosialisasi informasi dalam laporan kinerja untuk meningkatkan kepedulian seluruh pegawai.
- i. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi.

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 – 2024

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
1	2	5	6	7	8	9	10
Meningkatn ya kerukunan hidup bermasyara kat	Persentase Kejadian SARA Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Konflik Sosial Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatn ya partisipasi masyarakat dalam menggunak an hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,1%	69,77%	80,2%	87,05%	80,3%	89,53%
Meningkatn ya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,96)	A (85,54)	A (84,97)	A (85,62)	A (84,98)	A (86,12)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sasaran I
 - 1. Indikator kinerja pertama, jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan 2023 tidak mengalami perubahan yaitu tetap dimana realisasi 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan 100 %.
 - 2. Indikator kinerja kedua, jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan 2023 tidak

mengalami perubahan yaitu tetap dimana realisasi 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan 100 %.

b. Sasaran II

Indikator kinerja ketiga, untuk tahun 2022 tidak mencapai target dari target 80,1% hanya tercapai 69,77% hal ini dikarenakan banyak ormas yang tidak aktif ketika dilakukan monitoring, diantaranya ada yang sudah pindah tempat dan bubar tanpa pemberitahuan.

Untuk tahun 2023 bisa tercapai 87,05% dari target 80,2%, hal ini di sebabkan adanya tambahan ormas yang mendaftar dan up date data. Dari tahun 2023 ke tahun 2024 menunjukkan adanya kenaikan. Pada tahun 2024 hasil dari pengukuran ormas dan orpol aktif, terdapat ada 137 ormas dan 17 orpol aktif dengan jumlah 155 ormas dan 17 orpol terdaftar di Bakesbangpol. Realisasi ormas dan orpol aktif mencapai 89,53%, di atas target yang ditetapkan sebesar 80,3%.

c. Sasaran III

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami kenaikan nilai SAKIP, dimana pada tahun 2022 sebesar 85,54; pada tahun 2023 meningkat menjadi 85,62 dan pada tahun 2024 menjadi 86,12

Capaian sasaran I dan II ini mendukung Misi 1: **“Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan”** serta pencapaian target Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dimana tahun 2023 target nilai IKUB 83,7 dan dihitung pada tahun 2024 mendapai nilai indeks 85,49. Sedangkan untuk capaian nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 83,25 dan dilakukan penghitungan pada tahun 2024 dan mendapatkan nilai 90,53

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Kinerja Tahun 2024		Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	
1	2	4	5	6	7
Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kejadian SARA tertangani	100 %	100%	100%	100%
	Persentase konflik sosial tertangani	100 %	100%	100%	100%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,5%	80,3%	89,53%	111,22%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85)	A (84,98)	A (86,12)	101,32%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk Sasaran I:

Indicator kinerja pertama dan kedua yaitu persentase kejadian SARA tertangani dan persentase konflik sosial tertangani, setiap tahun targetnya sama yaitu 100%. Capaian realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target akhir renstra 2021-2026 sebesar 100% dengan tingkat kemajuan juga 100%.

Sasaran II:

Untuk indicator kinerja sasaran II realisasi sudah melebihi target tahun 2024 dan target akhir periode RENSTRA dengan tingkat kemajuan 111,22%.

Sasaran III:

Indicator kinerja sasaran III yaitu Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah realisasinya untuk tahun 2024 sebesar

86,12 sudah berada di atas target akhir renstra 2021-2022 yaitu 85, dengan tingkat kemajuan 101,32%.

4. PERBANDINGAN REASLISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL (TARGET SPM)

Bakesbangpol tidak mengampu urusan pelayanan dasar sehingga tidak menyajikan pengukuran SPM.

Disini akan di bandingkan dengan realisasi kinerja dari Bakesbangpol Kabupaten Blitar. Berikut perbandingan realisasi kinerja Bakesbangpol Kota Blitar dengan Bakesbangpol kabupaten Blitar:

Tabel 3.4
Perbandingan Reaslisasi Kinerja Sasaran
Bakesbangpol Kota Blitar dengan Bakesbangpol
kabupaten Blitar

KOTA BLITAR				KABUPATEN BLITAR			
Uraian Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kejadian SARA tertangani	100%	100%	Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa	Indeks Kesalehan Sosial	86	84,61
	Persentase konflik sosial tertangani	100%	100%	Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	90%	90%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,3%	89,53%	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi	Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi	80%	80%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,98)	A (86,12)	Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar	Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kab.Blitar	BB (75,3)	B (66,55)

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Keberhasilan capaian Indicator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan, tidak terlepas dari dukungan dana untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis Bakesbangpol Kota Blitar. Tabel di bawah ini menyajikan data belanja operasional dan modal Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Belanja

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1.	Belanja Operasional dan modal	28.049.470.361,00	27.049.731.977,00	96,44
	Jumlah	28.049.470.361,00	27.049.731.977,00	96,44

Rincian untuk realisasi anggaran belanja langsung seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran untuk Setiap Sasaran dan Program Tahun 2024

NO	Sasaran/Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat			
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.597.157.800,00	2.384.259.324,00	91,80
2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	287.958.000,00	271.447.900,00	94,27
3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.252.540.167,00	3.160.346.318,00	97,17
II	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik			

4	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	16.738.497.709,00	16.437.849.259,00	98,20
5	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	81.175.500,00	59.821.500,00	73,69
III	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah			
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.092.141.185,00	4.736.007.676,00	93,01

1. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.7
Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	2	3	4
Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kejadian SARA tertangani	6.137.655.967,00	10,95
	Persentase konflik sosial tertangani		
Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	16.819.673.209,00	59,96
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	5.092.141.185,00	18,15
JUMLAH		28.049.470.361,00	100

Total alokasi anggaran Bakesbangpol pada tahun 2024 sebesar **Rp. 28.049.470.361,00** terbagi dalam 4 (empat) indicator kinerja sasaran. Untuk indicator kinerja Persentase kejadian SARA tertangani dan Persentase konflik sosial memperoleh anggaran sebesar Rp. 6.137.655.967,00 atau 10,95%, yang merupakan gabungan dari 3 (tiga) program dan terdapat hibah FKUB, FPK, BNK, TNI dan POLRI.

Untuk indicator kinerja Persentase Ormas dan Orpol yang aktif memperoleh anggaran paling besar yaitu Rp. 16.819.673.209,00 atau 59,96% karena ada kegiatan Pemilu dan hibah untuk KPU dan BAWASLU sebesar 40% dari total hibah yang di berikan untuk pembiayaan Pemilu dan juga didalamnya terdapat dana hibah untuk 8 (delapan) parpol. Untuk secretariat mendapat anggaran sebesar yaitu Rp. 5.092.141.185,00 atau 18,15% yang merupakan belanja rutin.

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran per Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PROGRAM	ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kejadian SARA tertangani	100%	100%	100%	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.885.115.800,00	2.655.707.224,00	93,035
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya			
		Persentase konflik sosial tertangani	100%	100%	100%	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.252.540.167,00	3.160.346.318,00	97,17
	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,3%	89,53 %	111,5 %	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui	16.738.497.709,00	16.437.849.259,00	98,20

	dalam menggunakan hak politik					Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			
						Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	81.175.500,00	59.821.500,00	73,69
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Peringkat Daerah	A (84,98)	A (86,12)	101,3 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.092.141.185,00	4.736.007.676,00	93,01

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kejadian SARA tertangani	100	94,61	1,06
	Persentase konflik sosial tertangani			
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	111,5	98,09	1,14
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	101,3	93,01	1,09

Keterangan:

Efisiensi diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian keuangan

1 ≥ = **efisien**

1 < = **tidak efisien**

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian sasaran dan persentase realisasi anggaran. Realisasi capaian sasaran yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien. Untuk ke 4 (empat) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran semuanya efisien hal ini ditunjukkan dengan nilai efisiensi yang diperoleh lebih dari 1 (satu).

Pada indikator kinerja Persentase kejadian SARA tertangani dan Persentase konflik sosial tertangani, tingkat efisiensi tercatat efisien hal ini disebabkan potensi kejadian SARA dan konflik sosial selama tahun 2024 bisa ditangani.

Untuk sasaran ke 2 (dua) dengan indikator kinerja Persentase Ormas dan Orpol yang aktif tingkat efisiensi juga tercatat efisien hal ini disebabkan jumlah ormas dan orpol yang melaporkan keaktifannya sudah lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya dan melebihi target.

Pada sasaran ketiga dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah juga tercatat efisiensi hal ini didorong oleh keberhasilan Bakesbangpol dalam meningkatkan capaian nilai SAKIP di atas target yg ditetapkan dari target 84,98 diperoleh nilai 86,12.

C. PRESTASI/PENGHARGAAN

Pada tahun 2024 Bakesbangpol Kota Blitar telah memperoleh:

1. Peringkat 13 (tiga belas) dengan nilai A, Penghargaan SAKIP Tingkat Kota Blitar
2. Juara 1 Legal Drafting Award 2024
3. Juara Harapan 3 Satu Data Award

A. KESIMPULAN

Dari analisis hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa secara umum Bakesbangpol Kota Blitar pada Tahun 2024 mampu merealisasikan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan rata-rata sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian empat indikator kinerja sasaran Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut uraian target dan realisasi capaian kinerja untuk setiap sasaran:

1. Sasaran I

Meningkatnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama

a. Indikator Kinerja: Persentase kejadian SARA tertangani

Target : 100 %
Realisasi : 100 %
Capaian kinerja : 100 %

Selama tahun 2024 tidak ada kejadian SARA sehingga indikator kinerja ini masuk kategori sangat berhasil.

b. Indikator sasaran: Persentase Konflik Sosial tertangani

Target : 100 %
Realisasi : 100 %
Capaian kinerja : 100 %

Selama tahun 2024 tidak ada kejadian konflik sosial sehingga indikator kinerja ini masuk kategori sangat berhasil.

2. Sasaran II

Indikator sasaran: Persentase Ormas dan Orpol yang aktif

Target : 80,3 %
Realisasi : 89,53 %
Capaian kinerja : 111,5 %

Pada tahun 2024 tercatat ormas dan orpol yang aktif sebesar 89,53% sudah di atas target dengan capaian kinerja yaitu 111,5%, angka ini sudah menunjukkan indicator kinerja sangat berhasil

3. Sasaran III

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dimana nilai SAKIP Bakesbangpol mengalami kenaikan dibanding tahun 2023. Target nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 84,98 realisasi 86,12. Nilai realisasi ini menunjukkan indicator kinerja sasaran ke 3 (tiga) sangat berhasil.

Hasil dari analisis pengukuran kinerja ini dapat digunakan sebagai pijakan penentuan kebijakan berikutnya untuk tetap konsisten dalam pewujudan **Good Governance**.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Bakesbangpol Kota Blitar berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Blitar
Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
1	Mengopti malkan komunika si dan silaturah mi antar umat beragama	a. Perlu melakukan sosialisasi yang berkelanjutan yang tujuannya mampu mewujudkan sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama b. Peran stakeholder dalam memasyarakatkan moderasi beragama	- Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - Sub Kegiatan Pelaksanaan	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
		c. Mengoptimalkan peran FPK Tingkat Kota Blitar dan FPK Tingkat Kecamatan sebagai wadah komunikasi antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan d. Meningkatkan interaksi antar Pemuka Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan guna menumbuhkan sikap inklusif (terbuka) antar Pemuka Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan yang diharapkan akan diikuti oleh masing-masing anggota komunitas	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
2	Mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	a. Secara intens menggali informasi dari masyarakat b. Sinergi, harmonisasi pengampu kebijakan / <i>Stake holder</i> dalam penanganan konflik; c. Optimalisasi peran Timdu Penanganan Konflik Sosial d. Sosialisasi, edukasi tentang pentingnya kewaspadaan dini; e. Optimalisasi peran media massa f. Penguatan kewaspadaan dini Masyarakat g. Penguatan peran FKDM tingkat kecamatan/kota	- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
		dan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan/Kota	Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
3	Meningkatkan Pemberdayaan Ormas dan Orpol	a. Sosialisasi penggunaan aplikasi e-landa untuk Ormas dan Orpol guna secara rutin dan berkala melaporkan kegiatannya dan perubahan yang terjadi dalam struktur organisanya termasuk perpindahan kantor secretariat/keberadaannya. b. Dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas c. Diadakan kegiatan yang melibatkan Orpol yang ada di Kota Blitar	- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
			Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
			- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
4	Memberantas penyakit sosial mayarakat	a. Sosialisasi anti miras dan narkoba b. Patroli gabungan Kost-kostan dan tempat hiburan	- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
			- Keegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	a. Memanfaatkan aplikasi sukma-e Jatim dalam pengukuran SKM Perangkat Daerah b. Melaksanakan review perencanaan dengan monev berjenjang c. Pembagian tugas dan tanggung jawab kepada seluruh tim SAKIP dalam penyusunun dokumen d. Menyusun Tindak Lanjut rekomendasi monitoring pencapaian kinerja jangka menengah.	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
		e. Menyusun Laporan Hasil monitoring Tindak Lanjut rekomendasi monitoring pencapaian kinerja jangka menengah TW 3. f. Menyusun Ranwal Renstra yang memuat inovasi yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama 5 (lima) tahun g. Menyusun Rancangan LKjIP 2024 yang menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. h. Mengoptimalkan sosialisasi hasil pengukuran kinerja agar untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh seluruh unit/satuan kerja. i. Mengoptimalkan sosialisasi informasi dalam laporan kinerja untuk meningkatkan kepedulian seluruh pegawai. j. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan untuk perbaikan dan				

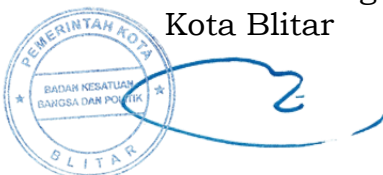
No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
		peningkatan kinerja organisasi.				

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024, semoga dapat memberikan informasi yang jelas akan capaian kinerja Bakesbangpol Kota Blitar. Mengingat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) akan dipergunakan secara terus menerus dan saling terkait dalam system informasi dan system manajemen instansi pemerintah, maka diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun oleh Bakesbangpol Kota Blitar akan mendapat masukan positif dan konstruktif dari berbagai pihak yang terkait sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan keberkahan dan kasih sayang-Nya sehingga kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bersama-sama membangun Kota Blitar dengan tulus ikhlas dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 5 Pebruari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Blitar



TOTO ROBANDIYO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612041996031004

Lampiran I LKjIP

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BLITAR
TAHUN 2021-2026**

Visi : Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur, Bermartabat
Misi : Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan

TUJUAN					SASARAN						CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal 2020	Target 2024	Uraian		Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal 2020	Target 2024	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) pada tahun bersangkutan	84,38	84,92	1.	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase Kejadian SARA Tertangani	Jumlah Kejadian SARA Tertangani ----- x 100% Jumlah Kejadian SARA	100%	100%	Meningkatkan upaya preventif dengan melakukan musyawarah bersama semua aliran agama	Peran aktif Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) berkoordinasi dengan TOGA TOMAS	
							Persentase Konflik Sosial Tertangani	Jumlah Konflik Sosial Tertangani ----- x 100% Jumlah Konflik Sosial	100%	100%	Menjalankan system respon dini yaitu merespon suatu konflik dengan cepat tanggap	Peran aktif FKDM Kota dan Kecamatan serta bekerja sama dengan instansi terkait	
					2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	Jumlah Ormas dan Orpol yang aktif ----- x 100% Jumlah Ormas dan Orpol terdaftar	NA	80,3%	Penerapan aplikasi untuk ormas dan orpol	Penyempurnaan data Ormas dan orpol aktif di Kota Blitar	
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	A (82,94)	A (84,98)	3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	82,94	84,98	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah	

Blitar, 2 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


 Kota Blitar
TOTO ROBANDIYO, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196612041996031004

Lampiran II LKjIP

RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BLITAR
TAHUN 2024

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kejadian SARA tertangani	100 %	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penyelesaian konflik keagamaan	100%	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	83%				1.970.315.200
									Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 orang	1.488.262.800
									Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 laporan	377.958.000
				Persentase kampung berkarakter Pancasila	9.5%		Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila	2 kampung	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	400 keluarga	104.094.400
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	78%	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi	90%				287.958.000
									Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 orang	85.000.000

									Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 laporan	202.958.000
	Persentase Konflik Sosial Tertangani	100%	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	100%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100%				3.257.884.167
									Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1810 orang	595.254.867
									Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 laporan	2.552.958.000
									Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	109.671.300
												17.322.926.797
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,3%	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100%	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	83%	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500 orang	1.638.534.200

men gun kan hak polit ik			SERTA BUDAYA POLITIK			Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 orang	49.971.900
									Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 dokum en	15.634.420.697
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarak atan yang aktif	72%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang aktif	121 ormas				49.983.200
									Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 orang	49.983.200
Men ingk atny a Kine rja Pera ngka t Daer ah	Nilai SAKIP Peran gkat Daera h	A (84, 98)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75							4.301.188.897
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%				27.052.400
									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokum en	8.526.200
								100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 lapora n	18.526.200
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar					2.920.896.449
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang	2.912.370.249
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5 lapora n	8.526.200

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%				162.027.176
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 paket	65.771.476
			Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	96.255.700
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%				395.036.194
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.369.100
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	19.503.100
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	42.710.494
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	31.800.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.192.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	7.800.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	40 Laporan	247.272.000
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.389.500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%				232.203.600
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	41 unit	84.623.700
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	147.579.900
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%				256.392.360
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	44.282.160
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	212.110.200

						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%				307.580.718
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	119.458.718
									Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	6.324.000
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	32.058.000
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	149.740.000
TOTAL												27.190.256.261

Blitar, 2 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Blitar



TOTO ROBANDIYO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612041996031004

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BLITAR**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TOTO ROBANDIYO S.Sos.,M.Si.**
Jabatan : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase Kejadian SARA Tertangani	100.00(%)
		Persentase Konflik Sosial Tertangani	100.00(%)
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80.30(%)
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.98(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3,252,540,167.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Insentif Fiskal,Pendapatan Bagi Hasil
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	287,958,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Pendapatan Bagi Hasil
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	81,175,500.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Insentif Fiskal,Pendapatan Bagi Hasil
4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	16,738,497,709.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil,Pendapatan Bagi Hasil
5	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2,597,157,800.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Insentif Fiskal
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,092,141,185.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Insentif Fiskal,Pendapatan Bagi Hasil
Total:		28,049,470,361.00	

WALIKOTA BLITAR,
Walikota Blitar,

Drs. SANGTOSO, M.Pd

Blitar, 23 September 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Blitar,

TOTO ROBANDIYO S.Sos.,M.Si.
NIP. 196612941996031004

Lampiran IV LKjIP

PENGUKURAN KINERJA KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BLITAR

Perangkat Daerah/Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
Tahun : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	TAHUN 2024		KET	PROGRAM	PAGU Rp.	TAHUN 2024		KET
					REALISASI	%				REALISASI	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Persentase kejadian SARA tertangani	Jumlah kejadian SARA tertangani/ Jumlah kejadian SARA x 100 %	100%	100%	100%		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.597.157.800	2.384.259.324	91,80	
								Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	287.958.000	271.447.900	94,27	
		Persentase konflik sosial tertangani	Jumlah konflik sosial tertangani / Jumlah konflik sosial x 100 %	100%	100%	100%		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.252.540.167	3.160.346.318	97,17	
		Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	Jumlah Ormas dan Orpol yang aktif / Jumlah Ormas dan Orpol terdaftar x 100 %	80,3%	89,53%	111,5 %		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	16.738.497.709	16.437.849.259	98,20	
								Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	81.175.500	59.821.500	73,69	
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai Sakp PD	A (84,98)	A (86,12)	101,3 %		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.092.141.185	4.736.007.676	93,01	

Blitar, 2 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Blitar



TOTO ROBANDIYO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612041996031004

Lampiran V LKjIP

A. DAFTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) KOTA BLITAR							
NO	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT/TELP.		JUMLAH ANGGOTA	JENIS ORGANISASI	STATUS
		KETUA					
1	Wanita Khatolik Republik Indonesia (WKRI) Cabang Blitar	Chaterina Sartiyah / 08113772465	Jl Toba A. VI no 19	Telp. 08564949979/BIMAS PDT Rerni adi 081334706149	152 orang	keagamaan	Aktif
2	PC. Majelis Agama Budha Theravada Indonesia (MAGABUDHI)	Sugianto Gandhika	Jl. Slamet Riyadi No. 21 Blitar	Telp 0342.802616 085649590339	30 orang	keagamaan	Aktif
3	PC. Nadhlatul ulama (NU)	Dr KH Habib Bawafi/ 081555637273	Jl. Cisadane Blitar	H. Sarianto/ 082299331926	250 orang	keagamaan	Aktif
4	Muslimat NU Cabang Blitar	Hj. Umi Salamah	Jl. Masjid No. 24 Blitar	TELP. 0342.801120	250 orang	keagamaan	Aktif
5	PEPABRI Cabang Kota Blitar	Purna Letkol Mulyono	Jl. Kombes Pol Duryat No 8 Blitar	.TELP. 0342.801642 -7705104	608 orang	profesi	Aktif
6	Piveri Kab / Kota Blitar	Mugeni Mayor Inf Purn / 081233224678	Jl. Tanjung no. 1 Blitar	hp. 081358068026	102 orang	wanita	Aktif
7	DPC LVRI Blitar	Mugeni Alaziz Mayor Inf Purn / 081233224678	Jl. Tanjung 1 Blitar TELP. 0342.805002	HP. 081233224678	162 orang	profesi	Aktif
8	Persatuan Purnawirawan Polri (PP POLRI)	Mulyani AKP Pur/ 081226056090	Jl. Legundi No. 418 Blitar TELP. 0342.808864	Telp. 08133430734	356 orang	profesi	Aktif
9	PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN PERIP Blitar	Heriyanti Sutarji	Jl. Kombes Duryat No. 8 Blitar TELP. 0342.801642	Telp. 801642	325 orang	wanita	Aktif

10	Dewan Harian Cabang Angkatan (DHC) 45 Blitar	TUGIYANTO SAPARI	Jl. Tanjung No. 1 Blitar TELP. 0342.805002	ketua/ 085731944515 sek/ 081572787528 bend/ 082141807980	60 orang	profesi	Aktif
11	Peguruan Ilmu Seni Beladiri Pencak Silat Tenaga Dalam “Basmalah”	HM. SUNARYO	Jl. Aryo Blitar Rt.3/II Blitar	Telp. 552912 / 804230	4345 orang	bela diri	Aktif
12	FKPPI	Bayu Setyo Kuncoro	Jl. Tanjung No. 3 Blitar		70 orang	profesi	Aktif
13	Purna Paskibraka Indonesia Kota Blitar	Haryo Aditya	Jl. Ciliwung No. 28 Blitar	0342.7806953	78 orang	kesamaan scr umum	Aktif
14	Asosiasi Petugas Rekrut Tenaga Kerja Indonesia Kota Blitar (ASPERTI)	Haryono	Jl. Seruni No. 15 Kota Blitar	082113539999	18 orang	profesi	Aktif
15	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Blitar	Fatkur Rohman	jl m Junaidi Sekardangan	hp085 755 588 801	20 orang	keagamaan	Aktif
16	KOPRI (PMII WANITA)	Hinaya Fatma	jl m Junaidi Sekardangan	hp085807113704	20 orang	wanita	Aktif
17	DPC PROJO (PRO JOKOWI)	FERRY YUSWANTO	JL. TGP NO 1 BLITAR		100 orang	ormas	Aktif
18	Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI)	SAMSURI	Jl Pinus 10 kepkidul	Telp. 810598 - 081279808210	40 orang	kesamaan scr umum	Aktif
19	Ikatan Dai Indonesia (IKADI)	Dr. AZHAR ANWAR	Jl. Enggano Kel.Sananwetan	Tlp.7721824 / 08564586660	125 orang	keagamaan	Aktif
20	PD Senkom Mitra Polri Lokal Jatim 07 Blitar	ACHMAD WINARTO, S.Pd/ 081334049635	JL. IR SOEKARNO 200	342,812023	50 orang	profesi	Aktif
21	FATAYAT NU KOTA BLITAR	SRIATIN	JL. MASJID 24		250 orang	agama	Aktif
22	Ikatan Bidan Indonesia	DWI SAKTI NURHAYATI	JL. S. SUPRIADI NO 61 BLITAR	TELP. (0342) 802162	200 orang	profesi	Aktif
23	KOTA BLITAR DEVELOPMENT COMMITTEE (BLITAR-DEC)	NURUL HIDAYAH	Jl. Ternate RT002 RW 004 Kel. Klampok		10 orang	profesi	Tidak Aktif
24	KOMUNITAS SEPEDA TUA INDONESIA (KOSTI)	Ali Rohmat	Jl Musi	081555754744	30 orang	komunitas	Aktif

25	DPC GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Blitar	Tri Kurnia Aldi	Jl Baliton karangtengah Blt	089680596229	500 orang	kesamaan scr umum	Aktif
26	IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA (IPNU)	ISOMUDIN ZUHRI	JL. CISADANE Kel.Bendo Blitar	hp085746540188	30 orang	keagamaan	Aktif
27	NASYIATUL 'AISYIYAH	SEFTI ANA W.	JL. COKROAMINOTO NO.3		100 orang	keagamaan	Aktif
28	HIMPUNAN INSAN PECINTA BUNG KARNO (HIP-BK)	TAN NGI HING	JL. BENGAWAN SOLO NO.7 KOTA BLITAR		5 orang	komunitas	Aktif
29	Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) Cab. Blitar	Dr. Azhar AnwaR	Jln Cemara No.249 Blitar	Telp. 807592 hp.085815585759	200 orang	lsm	Aktif
30	PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA BLITAR	Baihaqi	JL. Ir. SOEKARNO NO. 13 KOTA BLITAR	hp 085735910091	100 orang	keagamaan	Aktif
31	RAPI Blitar	a. Ket. : Drs. Tri Iman P, M.Si	Jl. Kelud kopl. Stadion Supriyadi Blitar	hp 085780142256	90 orang	lsm	Aktif
32	Persatuan Wredatama RI (PWRI)	Dwi Agus Basuki	Jl. Anjasmoro No. 83 Blitar	08214304085	43 orang	kesamaan scr umum	Aktif
33	Senam Tera Indonesia (STI) Cabang Kota Blitar	a. Ket : JH Karsum	Jl. Cipemali : 60 Tanggung – Blitar	(0342) 806416 / 085	50 orang	komunitas	Aktif
34	Perkumpulan Fajar Jaya Dharma Sosial Blitar	a. Ket : Sintawati	Jl. Ir. Soekarno 345 Sentul Blitar	hp 081235 290	10 orang	aliran kepercayaan	Tidak Aktif
35	Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI)	ERNAWATI/ 08113623777	Jl. Perum Puri Kenari Asri Blok J-2 Karangtengah Kota Blitar	Telp. 0811363487	100 orang	profesi	Aktif
36	Gabungan Olahraga Wanita (GOW)	A.Ket : Feti Wulandari	Jl S. Supriyadi Nomor : 18 – Blitar	(0342) 801422	100 orang	wanita	Aktif
37	Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKBM)	a. Ket : Mustofa, S.Pd	Jl. Ciliwung Nomor : 304 – Blitar	(0342) 815120	35 orang	lsm	Aktif
38	Persatuan Wanita Olah Raga Seluruh Indonesia (PERWOSI)	Feti Wulandari	Jl. S. Supriyadi Nomor : 22 Blitar	(0342) 801472	50 orang	wanita	Aktif
39	Himpunan Paudi kota Blitar	a. Ket : Sri Winarsih, S.Pd	Jl. S. Supriyadi Nomor : 18 Blitar	(0342) 801472	25 orang	profesi	Aktif

40	Gab. Organisasi Penyelenggara TK Indonesia (GOPTKI) Kota Blitar	a. Ket : Ibu.Retno Ambaryani Priyo S	Jl. S. Supriyadi Nomor : 22 Blitar	(0342) 801472	25 orang	profesi	Aktif
41	Generasi Muda “ KOSGORO ” Cabang Kota Blitar	Drs.Moryani,SH	Jl. Untung Suropati No. 1 Blitar		50 orang	lsm	Aktif
42	Dewan Kesenian Kota Blitar (DKKB)	Susanto,WS	Jl.Ir. Soekarno Blitar	801815 / hp 085790284869 08123357559	25 orang	kesamaan scr umum	Aktif
43	Ikatan Remaja Muhamadiyah (IRM)	Mustakim	Jl. Cokroaminoto No. 03-05 Blitar		100 orang	keagamaan	Aktif
44	Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong Royong (KOSGORO)	Ir.Budi Santoso	Jl. Gatut Koco Blok. G No. 9-10 Blitar		50 orang	lsm	Aktif
45	Pimpinan daerah Aisyiyah Kota Blitar	DR Wasingah/ 0882141713505	Jl. Cokroaminoto No. 3 Blitar	hp 081259430370	100 orang	keagamaan	Aktif
46	Bhayangkari Cabang Blitar	Ny.Gatot Subiantoro	Jl. Sudirman No. 32 Blitar		250 orang	wanita	Aktif
47	Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT)	HERY	Jl. Cokroaminoto Gang Masjid Blitar	HERY085607663417 IZZUL 081555634494	25 orang	lsm	Aktif
48	Perserikatan Muhammadiyah Cabang Kota Blitar	Lukiarto	Jl Cokroaminoto	Telp. 804754	100 orang	keagamaan	Aktif
49	Perserikatan Muhammadiyah Kec. Kep.kidul Kota Blitar	Agus Setyo	Jl. Kelud No. 70. B Blitar	085233365553	30 orang	keagamaan	Aktif
50	Dharma Pertiwi Cabang Blitar	ARIES SUHARDONO	Jl. A. Yani No. 6 Blitar		25 orang	wanita	Aktif
51	Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Blitar	RETNO AMBARJANI Priyo S/ 085606098600	Jl. Sudanco Supriyadi No. 22 Blitar		250 orang	wanita	Aktif
52	Persekutuan Do'a Ekklesia Blitar	Bambang Indra Misianto	Jl diponegoro		50 orang	keagamaan	Aktif
53	Perguruan Senam Tenaga Dalam Bhirawa Seta	a. Ket. : R. HENDRO MS.	Jl. Slamet Riyadi 80 Blitar		15 orang	bela diri	Tidak Aktif
54	Persatuan Dokter Gigi Indonesia	a. Ket.: Drg. HM. SUDARMADJI	Jl. Jagung Suprpto 15 Blitar		50 orang	profesi	Aktif
55	DPC. Gapensi	a. Ket. : JODIONO	Jl. Ngegong Gedog Blitar	Telp. 814955	15 orang	profesi	Aktif

56	Becak Wisata Makam Bung Karno	a. Ket. : MARYONO	Jl. Dr. Cipto No. 3 (PIPP) Blitar	Telp. 815544	80 orang	profesi	Aktif
57	Himpunan Pedagang di Makam Bung Karno (HIPEMAB)	a. Ket. : SUTARTO HADI	Jl. Dr. Cipto No. 3 Blitar (PIPP)	Tlp. 08585578534	60 orang	profesi	Aktif
58	DPC. Pemuda Pancasila	a. Ket. : MOESGITO KHANCIL	Jl. Jati IV/33 & Jl. Kerantil Gg. 6 No. 33	Tlp.803225 hp 081394091116	25 orang	lsm	Aktif
59	Organda Blitar	a. Ket. : IR. HERI ROMADHON	Aks Tubun I/46C	Aks Tubun I/46C Telp. 805374	25 orang	profesi	Aktif
60	Paguyuban Sang Galih Blitar	a. Ket.:KH.AM.GATUT HARDJITO	Jl. Cisadane No.25 Kel.Bendo Blitar	Tlp.08155569 4422 /	10 orang	keagamaan	Aktif
61	Salimah Kota Blitar	a. Ket.: UMUL FADILAH,S.Si. Apt.	Jl. Barito Selatan No.24 Kel. Kauman	Hp. 082330538218	200 orang	keagamaan	Aktif
62	ORARI Lokal Blitar	a. A.Warjanto	borobudur	hp 08125233019	40 orang	lsm	Aktif
63	Paguyuban Pedagang Asongan Mandiri B2K	a. Ket : Sugembong Wibowo	Jln. Kalimas Rt 01/VI Pakunden	Telp. 08523563347	40 orang	profesi	Aktif
64	DPC Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI)	a. Ket : Bambang Sunarso	Jl Ikan Gurami : 2 Perum Griya Kalimas Indah Pakunden Blitar		20 orang	profesi	Aktif
65	Paguyuban Pemerhati Istana Gebang (PIIG) Kota Blitar	a. Ket: S. Setyawan	Jl. Dr. Soetomo No. 15 Kota Blitar		10 orang	komunitas	Aktif
66	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten/Kota Blitar	a. Ket : Lestari	Jl. Ir. Soekarno	agus supriono hindu 081252193250	25 orang	keagamaan	Aktif
67	PC. IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA (IPPNU) KOTA BLITAR	Wasingatin Catur kh	PCNU It 1.Jl. Cisadane 9 RT 01 RW 03 kepanjenkidul	082228317721	100 orang	keagamaan	Aktif
68	DPD PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA	Sri Winarni/ 08123398272	JL. Dr. Sutomo No. 56 Kota Blitar		125 orang	profesi	Aktif
69	IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH	Sukma Uli Nuha	Jl. Ir. Sukarno No 13 Kota Blitar	hp 082214275021	50 orang	keagamaan	Aktif
70	Perkumpulan lembaga Kursus dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat	Yuniasih	Jl. Jawa No. 53 Kota Blitar		10 orang	lsm	Aktif
71	Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Blitar	Miskan Hadi Prasetyo, ST	Perum Puri Kenari Asri Blok H-11 Kota Blitar		4221 orang	bela diri	Aktif

72	Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD)	Soegeng Joenianto, ST/ 081230169285	Jl. A.Yani RT/RW 01/VI		55 orang	kesamaan scr umum	Aktif
73	ASPERTANAS	Handoko Pramono, SE	Jl. Merapi No. 5 Blitar		15 orang	profesi	Aktif
74	DPD KNPI Komite Nasional Pemuda Indonesia	Jimmy Yanuar	Jl. Veteran Blitar		30 orang	kesamaan scr umum	Aktif
75	DPD AMPI Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Kota Blitar	Haryono		082113539999	25 orang	kesamaan scr umum	Aktif
76	PEMUDA BATAK BERSATU DPC BLITAR RAYA	LANCAR PANDAPOTAN SINAGA	JL. BALI NO. 209 BLITAR		20 orang	kesamaan scr umum	Aktif
77	HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) KOTA BLITAR	RIO ADI SAPUTRA PAYER	JL Sumba gg2 karangtengah	HP 082111000458	200 orang	keagamaan	Aktif
78	Korp HMI Wati (KOHATI)	Eka y Riski/ 085851414237	JL Sumba gg2 karangtengah	085851414237	225 orang	keagamaan	Aktif
79	GOLDEN SILAT	M. FAUZI	JL. MENDUT 49		40 orang	lsm	Aktif
80	FKKPBM/BARET MERAH	AGUS HARI M/ 085815428730	Jl Raras Wuyung		35 orang	kesamaan scr umum	Aktif
81	PAGUYUPAN SOSIAL MARGA TIONGHOA INDONESIA	MIKO K. SUGIHARTO	BTN ASABRI Jl. Branjangan Rt001/Rw013 Blok A-8 Gedog, Sananwetan Kota Blitar	hp081330800309 (p. HING) 081334793509 (Miko)	25 orang	kesamaan scr umum	Tidak Aktif
82	IKATAN ALUMNI RESIMEN MAHASISWA INDONESIA / IARMI	SUGENG ISNAWANTO, MPd/ 081333173500	JL a Yani 137	081333173500	25 orang	kesamaan scr umum	Aktif
83	KOMUNITAS KAIN DAN KEBAYA INDONESIA	Dra. SUNIK ANDAYANI / 081333315454	JL DIENG 57		40 orang	kesamaan scr umum	Aktif
84	PERSATUAN PURNAWIRAWAN TNI-AD	ka.Mayor Inf Purn Tulus Sukamto Waka. Mayor Inf.Pur, Budi Santoso	Jl Sudanco Supriadi Blitar	081217743940	325 orang	profesi	Aktif
85	ASOSIASI PEDAGANG KAKI LIMA INDONESIA (APKLI)	SUGRNG WIDODO, SPd.	JL. MANINJAU E I No 10.	085606129252	25 orang	profesi	Aktif

86	Perkumpulan Pedagang Bumi Proklamator/ PERDAMITOR	YOSSY YULIANDRI	JL Merapo/Bakso Gong alon2	admin,JIMMY ER / 082134031131	40 orang	profesi	Aktif
87	MAJELIS DAERAH KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (MD KAHMI)	AGUS SETYO SPd, MPd	JL GUNOJOYO 57 GEDOG		30 orang	kesamaan scr umum	Aktif
88	PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (PSHT)	Miskan Hadi ST./ 081335939006	puri kenari asri blok h - 11	0351-451548, 452549	4221orang	bela diri	Aktif
89	MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA (MLKI)	TRIMO/ 085855216240	CPM BLOK C NO.9 PERUM MELATI	08125207891, 089518171168	200 orang	aliran kepercayaan	Aktif
90	Front Mahasiswa Revolusioner	Erdyn Subchan	Jl Mendut No 42, Bendogerit, Sananwetan, Kota Blitar	082214343995	20 orang	lsm	Aktif
91	BADAN MUSYAWARAH ANTAR GEREJA (BAMAG) KOTA BLITAR	Stefans Edi P (08123295792)	Jl.Brigjen Katamso Kelurahan Gedog	ADMIN THEOPANI CAHYO YUWONO 082335930181	15 orang	keagamaan	Aktif
92	Relawan GARDA NUSANTARA	ARIK GUNARIYANTO	Jl RM Suryo 17 Sentul		50 orang	komunitas	Aktif
93	FORHATI / ALUMNI HMI WATI	BADRIYAH/ 08113667200	Jl Bintang 20 Blitar		15 orang	kesamaan scr umum	Aktif
94	PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA, PUANHAYATI	Lucia Krismanti Wasonowulan	Jl. melati		20 orang	aliran kepercayaan	Aktif
95	SENI BELADIRI GERAK CEPAT BERUANG PUTIH	Dwi Sasongko Mardiono, 081367736739	Jl. Wilis No.42 Wlingi Blitar,		136 orang	bela diri	Aktif
96	Gerakan Pemuda Ansor (GP-ANSHOR) Kota Blitar	Didin Mashudi,BA	Jl. Masjid No. 22 Blitar	hp081333923237	200 orang	keagamaan	Aktif
97	Yayasan Iman Blitar	Drs. RA. SUDARWADJI	Jl. Sudarmo No. 1 Blitar	Telp. 801775 '081217691323	5 orang	yayasan	Aktif
98	Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Blitar	H. MOCH MUNIR	Jl. Ir. Soekarno 44 Blitar	TELP. 0342.802516/ 811263	6 orang	yayasan	Aktif
99	Yayasan PYPLP - PGRI	TRIMO, S.Pd,M.Pd	Jl. A.Yani No, 100 Blitar	TELP. 0342.801525	20 orang	yayasan	Aktif
100	Yayasan Rukun Ginawa Sentosa (YARGIS)	HARTOYO	Jl. Kalasan No. 108 RT 5/7 Blitar	TELP. 087889145707	15 orang	yayasan	Aktif

101	Yayasan Paraphisikologi Semesta	TEDDY KLENIK	Perumnas Pakunden F.12 Blitar	Telp.0812522 7782 -085707997757	5 orang	yayasan	Bubar
102	Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa	KI Drs. SAIFUL RIFA'I SH/	Jl. A.Yani 46 Blitar	TELP. 0342. 802254	6 orang	yayasan	Aktif
103	Yayasan KY. R. Moh. Kasiman Blitar	ZARKONI	Jl. Masjid No. 15 Blitar	Telp. 801713 /	7 orang	yayasan	Aktif (Update tgl 2 Agust 24)
104	Yayasan Harmoni	Pdt Max Prayogianto	Jl. Cemara Selatan No. 66 Blitar	Telp. 805787	8 orang	yayasan	Tidak Aktif
105	Yayasan Monumen Syuhada' Haji	H. Zaenal Effendi	Jl. Lekso No. 5 Blitar	Telp.0812331	9 orang	yayasan	Tidak Aktif
106	YAYASAN OMAH SURGA		JL. KELUD NO. 28 KOTA BLITAR		10 orang	yayasan	Aktif
107	YAYASAN AL MUALLIMIN AL BLITARI CABANG KOTA BLITAR	MASHUDA	JL. KALI LEKSO RT.02 RW.01 PAKUNDEN		7 orang	yayasan	Aktif
108	Yayasan Gerontologi Abiyoso Blitar	Drs. H. Soeryono	Jl. Musi No.5 Blitar		6 orang	yayasan	Bubar
109	Yayasan Al Ghifari	a. Ket : Nurhadi	Jl. Sumba Nomor : 38 – Blitar	(0342) 816767	33 orang	yayasan	Aktif
110	Yayasan Kathalisma 75	a. Ket. : DJOKO SUDIBYO	Jl. Hasanudin 6 Blitar		12 orang	yayasan	Bubar
111	Yayasan Sunangiri	SUBAKIR /	Jl. Tidar 16 – 17 Blitar	Telp. 803663 / 7707067 /	15 orang	yayasan	Aktif
112	Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Islam	a. Ket. : Drs. FARIED AKHMADI	Jl. Lekso 12 Blitar		10 orang	yayasan	Tidak Aktif
113	Yayasan Pendidikan Kebudayaan Nasional (YAPENAS)	a. Ket. : M. HANAFI	Jl. Tengger No. 36 Blitar	Telp. 802598	13 orang	yayasan	Aktif
114	Yayasan Pendidikan SMP Sore 2 Blitar	a. Ket. : Hj. NAFISATUN	Jl. Sultan Agung No. 36 C Blitar		25 orang	yayasan	Tidak Aktif
115	Yayasan Taman Kanak-Kanak Pertiwi	Ny. RETNO AMBARYANI PRIYO S	Jl. Diponegoro No. 23 Blitar		18 orang	yayasan	Aktif

116	Yayasan Al-Istiqlal	a. Ket. : ZAINUDIN KHOIRI	Jl. Ir. Soekarno No. 88 Blitar	Telp. 808925	8 orang	yayasan	Aktif
117	Yayasan Pendidikan Luar Biasa	a. Ket. : Drs. SUGIARTO	Jl. TGP. No. 28 Blitar		21 orang	yayasan	Aktif
118	Yayasan Yohanes Gabriel Wijana Sejati	Iwan Setia budi SS / 082231337222	Jl. Diponegoro No. 44 Blitar		75 orang	yayasan	Aktif
119	Yayasan Kalimasada (Kajian Penelitian Masyarakat Antar Daerah)	a. Ket. : TUTUT GIRIANTO/ 085257092260	Jl. Kaca Piring 79 Blitar		6 orang	yayasan	Tidak Aktif
120	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Blitar (YLKI)	a. Ket. : M. HANAFI, SH	Jl. Kenari II/9 Blitar	Telp. 808651 /	15 orang	yayasan	Aktif
121	Lembaga Pengembangan Sosial Dan Lingkungan Hidup / Yayasan Nasional Blitar	a. Ket. : Ir. SUNARSO	Perumnas Pakunden Blok D / 10 Blitar	Telp. 807663	12 orang	yayasan	Tidak Aktif
122	Yayasan Mandiri	a. Ket. : M.AGUS SLAMET, SE	Perumnas Pakunden Blok E1/24 Blitar		26 orang	yayasan	Tidak Aktif
123	Yayasan Nasional	a. Ket : MUHAMMAD HANAFI	Jl. Tengger No. 36		27 orang	yayasan	Tidak Aktif
124	Yayasan Shidiqiyah	a. Ket. : Drs. M. KUNTARTO	Jl. Turi No.3		28 orang	yayasan	Tidak Aktif
125	Yayasan Tunas Harapan Bangsa	a. Ket. : RETNO WIDODO	Jl. S. Agung 5Blitar	Telp. 801701	29 orang	yayasan	Aktif
126	Yayasan Djaladri	a. Ket. : ANDI YUWONO, S.Sos.	JL. CIMANDIRI GG BUNTU LING. BADUT KEL TANGGUNG	telp. (0342) 7704160 /	12 orang	yayasan	Aktif
127	Lembaga Yayasan Ponpes Mambaus Syafa'atil Qur'an Ngegong Gedog Kota Blitar	a. Ket : Nur Cholis	Jl. Letda Markawi Ngegong Gedog Kota Blitar	Telp. 800491	15 orang	yayasan	Aktif
128	Yayasan Taman Pendidikan PA "Tarbiyatul Falah " Blitar	Dewi Halimah/ 082333518135	Jl. Manggar No. 9 Blitar	telp.0813348	18 orang	yayasan	Aktif
129	Yayasan Mambaul Hisam Pakunden – Blitar	a. Ket : H. Ali Mustofa	Jl. Asahan No. 52 Blitar		15 orang	yayasan	Aktif
130	Yayasan Taman Pendidikan Islam (YATPI) Blitar	a. Ket : Drs. Sjamsuka	Jl. Diponegoro No. 8	Telp- 0342 804156	15 orang	yayasan	Aktif
131	Yayasan Ponpes Bustanul Muta'allimin Blitar	a. Ket : Muhtar Lubby S.Ag	Jl. Barito No. 2 Blitar	Telp. 0342-805689	15 orang	yayasan	Aktif

132	Yayasan Al Istiqlal Hidayatullah Blitar	a. Ket : Taufiq Sholihin	Jl. Srigading No. 52 Blitar		36 orang	yayasan	Aktif
133	Yayasan Ibadurrohman Blitar	a. Ket : M. Mansur Shodiq	Jl. Kol Sugiono Gg. Masjid Ngegong ,Gedog, Blitar		5 orang	yayasan	Aktif
134	Yayasan Indonesia Baru	a. Ket.Purwanto, SPd	GMI Blok I No. 10 Blitar	Telp. (0342) 7745222 /	15 orang	yayasan	Aktif
135	Ys Kemanusiaan Jatidiri Bangsa Cab. Blitar	a. Ket. Mardani	Lk. Santren – Tanggung – Blitar		12 orang	yayasan	Aktif
136	Yayasan Klenteng Poo An Kiong	a. Ket :Dg Thin Soek Liong	Jl. Merdeka 194 Blitar	Telp. 08123335454	12 orang	yayasan	Aktif
137	Yayasan Patria Mulia (YPM) Blitar	a. Ket : Fatkhur Rochman	Jln Turi Selatan		15 orang	yayasan	Aktif
138	Yayasan H Sabih Goenadjaya dikoesoemah Cabang Blitar	a. Ket : H. Daiman Azis	Jl. Ir. Soekarno 287Sentul Blitar		15 orang	yayasan	Tidak Aktif
139	YAYASAN Perkumpulan Sahabat Perempuan Anak Kota Blitar		jl. Kawi 88		45 orang	yayasan	Aktif
140	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)	KH. PARDI S.Pd	Jl. Ky Mojo, 21 RT1 RW5 Blitar	hp.081548558414	5800 orang	keagamaan	Aktif
141	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ky. R. M Kasiman	Nurwandito A	Jl. Masjid Nomor : 15 – Blitar	(0342)801713	12 orang	yayasan	Aktif
142	FORMAK	TRI SASONGKO	Jl. Kerantil Gang V No. 6 Blitar	hp .081334446540	8 orang	lsm	Aktif
143	LSM Jaring Investigasi Kejahatan Aparat (LSM Jihat)	a. Ket. Ir. Joko Trisno Mudiyanto	Jl. Toba F-26 Blitar Perum Pakunden Permai		30 orang	lsm	Aktif
144	LEMBAGA KEMANUSIAAN NASIONAL KOTAK AMAL INDONESIA	WARBITO	JL. CIPEMALI GG. X NO.18 KOTA BLITAR	hp 085730691155/ 081554170803	3 orang	yayasan	Aktif
145	Persada II Kota Blitar	a. Ket.: D. EDY SANYOTO,B.Sc/ 081222432157.	Jl. Dieng 26 a	081222432157.	70 orang	aliran kepercayaan	Aktif
146	Serikat Buruh Merdeka (SBM) Blitar	a. Ket.: MAHENDRA SETIA BUDI.	Jl. Patimura 128.c Blitar	Diah 082132688440	15 orang	lsm	Aktif

147	LSM Soko Limo	a. Ket : MUCHSON, SE/ 085855602222	Jl. Ploso No. 12 Blitar	0342-803263 HP081252226222 :	5 orang	lsm	Aktif
148	Pimpinan Umum Persatuan Korps Pembela Tanah Air (Korps Peta)	a. Ket. Arifan	Jln. Sdc. Suparyono No: 27	(0342) 692991	60 orang	kesamaan scr umum	Aktif
149	Rakyat Tuntut Amanah Keadilan (RATU ADIL)	a. Mohammad Triyanto	Jl Mendut Nomor : 49 Blitar	081333906789	35 orang	lsm	Aktif
150	DPD Pemuda Panca Marga (PPM)	Aris Wijaya	Jalan Tanjung Nomor : 1 Blitar	085784180865	19 orang	kesamaan scr umum	Aktif
151	LP-KPK	KETUA: S. Haryono SH.MH	Kelompok	082113539999	33 orang	lsm	Aktif
152	LPK RI	KETUA: Lancar P Sinaga	Jl. Bogowonto	081214769093	34 orang	lsm	Aktif
153	Yayasan Lembaga Mitra Usaha Masyarakat		Jl. Suren 35 Blitar	TELP.0342-7766876			Tidak Aktif
154	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Disabilitas Pelita Blitar	Ketua Sudiatmoko	Jl. Ciliwung No. 373		117 Orang	Organisasi Kemasyarakatan	Aktif
155	Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB JAYA)	Ketua : MUJIONO	Jl. Serayu 98 Kelurahan Bendo Kecamatan kepanjenkidul	085733611972	17 Orang	Organisasi Kemasyarakatan	Aktif

DAFTAR PARTAI POLITIK KOTA BLITAR PESERTA PEMILU TAHUN 2024
BERDASARKAN DATA SIPOL KPU

No.	Nama Partai	Alamat Kantor	Telp. Kantor	Ketua Partai
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Jalan Serayu No. 44 Rt 02 Rw 05 Bendo Kepanjenkidul Kota Blitar	085755481643	Yasin Hermanto
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	Jl. Timor No.42	081330800309 (T.Hing)	Endro Hermono
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	JL. Dr. Wahidin 59A	085755016875 (sretariat/Hendra)	Syahrul Alim
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	Jl. Kalimantan 81	(0342) 802673	Moch. Hardi Usodo
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	JL. Bunaken No. 9	'Yasin Hermanto	Hermanto
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	Jl. Palem No 23 Rt04 Rw04 Rembang Sananwetan Kota Blitar	08133209934 (Ahmad Hunaifi)	Muhammad Arifin '082299099950
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Perum Kenari Aari Blok A-19 RT 004 RW 003	(0342) 809065	Leo Sudilaksono
8	Partai Kebangkitan Nusantara	JL. Veteran 53 RT.03/08	081336785994	Mohamad Apie Dhelpilia Suhariyanto
9	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	JL. Dr. Sutomo No. 3	08123366554	Yossy Yuliardi
10	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)	Jl. Borobudur 114 Bendogerit, Sananwetan, Kota Blitar	085878487186	Drs. Sudarmadiono, M.Pd
11	Partai Amanat Nasional (PAN)	Griya Melati Indah I Blok B/10	0811106111	M. Heri Romadhon
12	Partai Bulan Bintang (PBB)	Jl. Cilincing No.04 RT 01 RW 09	085655633018	Sugeng Wahyudi
13	Partai Demokrat	Jl. Sumba No. 97 RT. 002 RW. 009	081233989995	Rido Handoko. S. Pd
14	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Grand Sentul Blok C No. 02 RT. 02 RW. 05	082330678934	Yudianto
15	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	Jl. Kawi RT.004 RW.002	081234973433	Herry Widianto
16	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	JL. Kalibrantas No. 76 Kauman Kepanjenkidul Kota Blitar	0342814690	Agus Zunaidi, SE
17	Partai Ummat	Jl. Ambalat 14A RT001/RW013, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar	085856993777 (P Herry)	Permana Bima Syahputra

